**JOURNAL COMMUNICATION SPECIALIST**

[**https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jcs/**](https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jcs/)

**VOL 2, NO 1, Maret 2023, 65-81**

**Pola Komunikasi Kepala Desa Dalam Penyampaian Program Padat Karya Tunai pada Desa Kendal**

Moch Enggy Sabastian 1 Sanhari Prawiredja2, Citra Angga Prareswari3

*1,2,3Universitas Dr. Soetomo, Surabaya-Indonesia*

*1,2,3* sanhari.prawiradiredja@ Unitomo.ac.id

***ABSTRACT***

*This research is motivated by the communication process carried out by the Village Head in delivering the Cash Intensive Work Program for the Acceleration of Improvement in Irrigation Water Use (P3-TGAI) as an Effort to Overcome Unemployment During the COVID-19 Pandemic. In conveying this, of course there are obstacles before the process of the Accelerated Improvement of Irrigation Water Use Management Program (P3-TGAI). The aim of this research is to find out how the village head's communication patterns are in efforts to empower the community through the Accelerated Improvement of Irrigation Water Use Program (P3). -TGAI) as an Effort to Overcome Unemployment During the COVID-19 Pandemic (Study on HIPPA Rukun Makaryo Kendal-Lamongan Village).*

*The type of research used in this research is a qualitative approach. This type of research uses a qualitative descriptive type. The data collection techniques used in this research are primary data techniques, namely interviews and observations as well as secondary data techniques. There were two resource persons in this research. In this research the technique used is qualitative analysis technique.*

*The results of this research show that the Village Head's communication pattern in the Program for the Acceleration of Improvement of Irrigation Water Use Management (P3-TGAI) is delivered and carried out well and can be well received and is right on target and produces change. In terms of delivery, the information conveyed regarding the Accelerated Program for Improving Irrigation Water Use (P3-TGAI) has been effective and on target so that the Accelerated Program for Improving Irrigation Water Use (P3-TGAI) can run well.*

*Keywords: Communication Patterns, Organizational Information, Community Empowerment, Acceleration Program for Increasing Irrigation Water Use (P3-TGAI)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana proses penyampaian komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dalam penyampaian Program Padat Karya Tunai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai Upaya Mengatasi Pengangguran Saat Pandemi COVID-19. Dalam penyampaian hal ini tentu saja terdapat hambatan sebelum proses dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi kepala desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai Upaya Mengatasi Pengangguran Saat Pandemi COVID-19 (Studi pada HIPPA Rukun Makaryo Desa Kendal-Lamongan).

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik data primer, yaitu wawancara dan observasi serta teknik data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola komunikasi Kepala Desa dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ialah disampaikan dan dilakukan dengan baik dan dapat diterima dengan baik serta tepat sasaran dan menghasilkan perubahan. Dari segi penyampaian, informasi yang disampaikan mengenai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sudah efektif dan tepat sasaran sehingga Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini bisa berjalan dengan baik.

**Kata Kunci**: Pola Komunikasi, Informasi Organisasi, Pemberdayaan Masyarakat, Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Air Irigasi (P3-TGAI)

**PENDAHULUAN**

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 memengaruhi segala aspek kehidupan termasuk meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran Indonesia sebesar 8,40 juta orang pada Februari 2022. Jumlah ini turun dari 8,75 juta orang pada Februari 2021, namun secara aggregate masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 pada Februari 2020 yang hanya pada angka 6,93 juta orang. Begitu juga dilihat dari angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tercatat TPT Indonesia sebesar 5,83% pada Februari 2022. TPT ini menurun dari 6,26% pada Februari 2021 namun tetap masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi Februari 2022 pada angka 4,94%.

A picture containing application

Description automatically generated

**Gambar 1**

**Perkembangan Tingkat Pengangguran di Indonesia**

Sumber: (bps.go.id)

Ekonomi bergerak karena ada 2 kekuatan, permintaan (demand) dan penawaran (supply). Konsumsi dan produksi. Namun, pandemi COVID-19 cukup memukul keras ekonomi Indonesia pada 2 (dua) sisi itu. Pembatasan sosial telah berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan turunnya kinerja ekonomi. Karena itu, Pemerintah menyiapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Tak hanya dari sisi produksi, namun juga konsumsi. Sampai saat ini, konsumsi rumah tangga adalah penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menjaga konsumsi berarti menjaga daya beli masyarakat. Maka, lewat bantuan sosial, pemerintah mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Perlindungan sosial diberikan melalui program PEN (demand side). Dengan perlindungan sosial, diharapkan sisi konsumsi bisa kembali. Karena, kebijakan mendorong sisi produksi (supply side) tak akan efektif jika permintaan (konsumsi) masih melemah. Itulah kenapa perlindungan sosial juga pulihkan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.

Padat karya tunai (cash for work) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot serapan program Padat Karya atau Infrastruktur berbasis Masyarakat (IBM) di TA 2021 melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) dengan alokasi anggaran Rp23,24 triliun. Program PKT bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19 Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memperbanyak program padat karya pada awal tahun 2021 sebanyak 2 – 3 kali lipat untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19. Salah satu program PKT yang dilaksanakan di Kementerian PUPR ada pada bidang Cipta Karya/permukiman yang terdiri dari program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp5,29 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 219.821 tenaga kerja tersebar di 15.936 lokasi. Tercatat hingga 15 November 2021 pukul 12.00 WIB realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar 93,39% senilai Rp5,21 triliun dan realisasi fisik sebesar 84,09% dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 362.488 orang.

Pembangunan infrastruktur permukiman dengan skema PKT salah satunya dilaksanakan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Pada TA 2021 Pamsimas dilaksanakan di 4.525 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp943 miliar untuk target 47.400 tenaga kerja. Tercatat hingga 15 November 2021 penyerapan tenaga kerja Pamsimas sudah sebanyak 48.694 orang. Sedangkan untuk program Sanimas dialokasikan anggaran Rp713 miliar untuk 23.100 tenaga kerja. Kegiatan PKT ini diantaranya dilaksanakan dengan pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR). Hingga saat ini progres penyerapan tenaga kerja PKT Sanimas sudah sebanyak 51.792 orang.

Pada Tahun Anggaran 2021 Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan pembangunan 6.000 unit bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp1,4 triliun dengan target menyerap 36.000 tenaga kerja. Program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik, dengan progres saat ini sudah terlaksana di 4.819 lokasi dengan serapan 38.523 tenaga kerja. Kegiatan PKT bidang permukiman selanjutnya adalah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang pada tahun 2021 akan menjangkau 1.500 lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk 38.012 tenaga kerja. Progresnya saat ini sudah terlaksana di 1.195 lokasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 34.503 orang.

Program PKT bidang permukiman juga dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 2.099 lokasi senilai Rp976 miliar dengan target 49.379 tenaga kerja. Progresnya hingga saat ini sudah terserap Rp967 miliar untuk di 2.064 lokasi. KOTAKU dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi.

Terakhir program PKT bidang permukiman dilaksanakan dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 147 lokasi dengan anggaran Rp90 miliar untuk menyerap 2.430 tenaga kerja. Saat ini sudah terserap melebihi target awal yaitu sebesar 4.198 tenaga kerja dengan anggaran yang sudah tersalurkan sudah 100%. Kegiatan PKT juga dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pola PKT sebesar Rp224 miliar dengan target serapan 23.500 tenaga kerja.

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (9) bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selajutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama pembangunan Desa selalu bersifat top down dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral. Idealnya segala bentuk pembangunan yang ada di desa harus berdasarkan aspirasi atau keinginan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaanya, karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin keadaan ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2003).

Kepala Desa tentunya wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat adalah komunikasi. Di mana saat ini komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.

Komunikasi Kepala Desa dengan pegawai serta masyarakat juga sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Adanya komunikasi Kepala Desa dengan masyarakat tersebut membantu untuk mendorong masyarakat agar sama-sama membangun desa seperti yang diharapkan. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam kaitannya dengan Program Padat Karya Tunai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil observasi dan interview awal, salah satu masalah yang dihadapai adalah terkait pola komunikasi Kepala Desa yang masih cenderung bersifat konvensional dan satu arah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melihat perlunya peningkatan pola komunikasi yang dilakukan kepala desa guna mencapai tujuan program secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Penyampaian Program Padat Karya Tunai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai Upaya Mengatasi Pengganguran Saat Pandemi COVID-19 (Studi pada HIPPA Rukun Makaryo Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan).

**METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskritif kualitatif dengan Metode Studi Kasus. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mendefinisikan Metodologi Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan, yang mungkin berasal dari naskah wawancara, observasi-catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan, menurut Sugiyono (2007) Metode Penelitian Kualitatif itu adalah:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik yang teramati).

Sementara itu, terkait dengan pendekatan Studi Kasus. Menurut Maxfield yang dikutip oleh Nazir (2009) dalam buku Metode Penelitian mengatakan, Studi kasus atau penelitian kasus (case study) adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Penelitian kualitatif dengan Studi Kasus menurut Emzir (2010) merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Atas dasar itu, dengan seksama dan terperinci mengkaji fenomena suatu kasus dalam waktu tertentu yaitu Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Penyampaian Program Padat Karya Tunai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai Upaya Mengatasi Pengganguran Saat Pandemi COVID-19 (Studi pada HIPPA Rukun Makaryo Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan).

**DISKUSI**

Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam setiap gerak kehidupan manusia, khususnya bagi sebuah organisasi yang memiliki program-program untuk memajukan organisasi tersebut demi kepentingan masyarakat. Pola komunikasi jug penting dalam sebuah organisasi untuk mengetahui pola apa yang digunakan seorang pemimpin untuk menyampaikan informasi yang disampaikan kepada anggotanya. Pola komunikasi adalah bentuk komunikasi yang digunakan seseorang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terdapat beberapa pola komuniasi yang ada di dalam komunikasi organisasi, seperti komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horisontal dan komunikasi vertikal. Penyampaian Program Padat Karya Tunai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai Upaya Mengatasi Pengganguran Saat Pandemi COVID-19 (Studi pada HIPPA Rukun Makaryo Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola komunikasi dari atas ke bawah dan komunikasi dari bawah ke atas. Pola komunikasi ini digunakan untuk tercapainya tujuan organisasi demi kepentingan masyarakat terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang sudah menjadi program pemerintah sebagai upaya mengatasi pengganguran saat pandemi COVID-19. Keefektifan komunikasi organisasi dalam sebuah organisasi sangat perlu, karena dalam sebuah organisasi kita dituntut untuk bisa menyampaikan dan menerima informasi tersebut dengan baik dan benar. Dalam hal ini pasti ada hambatan-hambaan dalam penyampaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berjumlah 2 (dua) orang, di antaranya Kepala Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dan Bapak Suwisno selaku Kepala HIPPA Rukun Makaryo Desa Kendal, penulis tidak menemukan hambatan dalam melakukan proses wawancara, karena semua narasumber memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas dan sangat terbuka sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dilakukan Kepala Desa kepada para pegawainya dan masyarakat disampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik dari segala segi penyampaiannya. Dalam penyampaian pesan mengenai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), media yang digunakan ini adalah Rapat. Rapat atau musyawarah sangat penting dilakukan dalam sebuah organisasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam organisasi tersebut demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. seperti halnya, alokasi dana desa juga perlu dirapatkan walaupun hal ini sudah diprogramkan oleh pemerintah. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) desa ini disampaikan dengan sangat detail dan diumumkan ke masyarakat melalui papan pengumuman yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi, rapat adalah media yang sangat efektif dalam menyampaikan hal tersebut.

Dalam komunikasi organisasi, rapat adalah salah satu media yang digunakan dalam sebuah organisasi. Rapat itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Rapat adalah salah satu kesempatan para pegawai untuk mengutarakan segala pendapat mengenai tema rapat tersebut. Hambatan dalam penyampaian informasi pasti akan selalu ada di dalam forum organisasi. Hambatan tersebut bisa saja perdebatan antara anggota karena tidak menyetujui pendapat pihak lain atau pun hambatn dalam menerima informasi yang didapatkan. Dalam hal ini, Kepala Desa sendiri menyampaikannya dengan sangat penuh penjelasan detail agar segala sesuatunya yang akan dijalankan dapat diterim dengan baik dan berjalan dengan lancar. Selain dari pada itu, rapat mengenai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dilakukan ini tidak hanya melibatkan prangkat inti desa, tetapi juga melibatkan beberapa lembaga masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat, yaitu LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD (Badan Perwakilan Daerah), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ibu PKK, dan Kader Posyandu.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sudah terealisasikan sesuai dengan informasi yang didapat penulis dari semua narasumber. Narasumber memberikan informasi terkait perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa demi kesehjateraan desa itu sendiri. Sebelum pelaksanaan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), sudah dijelaskan di atas bahwa sudah ada dilakukannya rapat mengenai RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), di dalam hal ini nantinya akan dikomunikasikan atau didiskusikan dengan perangkat desa tentang apa saja yang akan dibangun untuk Desa Kendal. Setelah dibuatnya RPJM tersebut, lalu perangkat desa akan membuat RKP (Rencana Kerja Pemerintah) terkait program alokasi dana desa, setelahnya pemerintah desa akan membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) untuk melakukan program Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tersebut.

Perencanaan yang disusun untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini sudah sangat tepat dan sudah berjalan sejak adanya pandemic COVID-19. Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini harus dilakukan dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bengawan. Jika tidak, akan ada peneguran dari pihak-pihak pengawas yang akan turun langsung ke tempat lokasi pengerjaan tersebut. Seperti yang telah penulis ketahui, bahwa pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini sudah berjalan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang ada.

Pengawasan terhadap Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) juga sangat diperlukan dalam prosesn pelaksanaannya. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini adalah dana yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Penyampaian Program Padat Karya Tunai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai Upaya Mengatasi Pengganguran Saat Pandemi COVID-19 (Studi pada HIPPA Rukun Makaryo Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan), Desa Kendal merealisasikan dana ini sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat di perencanaan yang sudah ditetapkan.

Laporan pertanggung jawaban yang diberikan nantinya berupa data-data terkait alokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pegawai-pegawai akan merekap berkas-berkas alokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang nantinya pekerjaan tersebut akan dilihat langsung oleh Kepala Desa sebelum diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bengawan. Laporan tersebut berisi SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), laporan Administrasi serta LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban).

Dalam melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pasti tidak akan jauh dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Telah diketahui dari penulis mengenai faktor-faktor tersebut bahwa hanya sedikit yang merasakan faktor penghambat dengan adanya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini. Baik itu Kepala Desa dan perangkatnya, serta masyarakatnya menerima program tersebut dengan baik demi kepentingan bersama dan manfaat yang baik untuk kedepannya bagi masyarakat Desa Kendal.

Komunikasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan para pegawainya berjalan dengan sangat efektif dan berjalan dengan lancar dalam proses penerimaan dan penyampaian ulang untuk masyarakatnya. Pemimpin dengan anggotanya mampu bekerja sama dengan baik demi kepentingan bersama dan demi kepentingan masyarakat. Para pegawai juga tidak sungkan dalam menyampaikan beberapa pendapat kepada atasannya, pendapat yang diberikan bawahan akan diterima dengan baik oleh Kepala Desa dan didiskusikan bersama dengan jalannya rapat atau musyawarah yang dilakukan.

Jadi, komunikasi dalam sebuah organisasi itu sangat penting untuk keberlangsungan organisasi itu sendiri. Maka dari itu, penulis di sini menggunakan Teori Informasi Organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan dan multitafsir. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada proses mengorganisasi anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Asumsi dasar teori ini adalah organisasi berada di dalam suatu lingkungan informasi, informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam bentuk tingkat kepastiannya dan organisasi berusaha untuk mengurangi ketidakpastian dalam informasi yang didapatkan.

Jadi pola komunikasi Kepala Desa ini sangat penting. Di mana penulis dapat mengetahui bagaimana proses pengemasan pesan atau informasi yang akan disampaikan ke para pegawai. Pola komunikasi ini bertujuan untuk tidak adanya informasi yang tidak pasti dan kejelasan yang tidak pasti dalam penyampaiannya, karena apapun yang disampaikan adalah demi kepentingan organisasi dan masyarakat. Organisasi itu sendiri juga harus bisa mengemas pesan atau informasi yang telah disampaikan Kepala Desa secara langsung, sehingga tidak ada terjadinya ketidakpastian akan informasi yang akan diterima masyarakat nantinya. Apabila informasi dapat dikemas dan disampaikan dengan baik, maka semua yang sudah direncanakan terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini akan berjalan dengan lancar dan berjalannya sesuai prosedur.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, serta hasil penelitian dan wawancara maka simpulan dari penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Pola Komunikasi Kepala Desa dalam Penyampaian Program Padat Karya Tunai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai Upaya Mengatasi Pengganguran Saat Pandemi COVID-19 (Studi pada HIPPA Rukun Makaryo Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan) adalah sebagai berikut:

1. Proses penyampaian informasi yang disampaikan Kepala Desa kepada para pegawai baik itu di kantor maupun melalui Kadus (Kepala Dusun) serta masyarakat berjalan dengan baik dan lancar serta efektif. Begitu pun proses penerimaan para pegawai, Kepala Dusun, dan masyarakat mereka dapat menerima pesan tersebut dengan baik.
2. Media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ini disampaikan melalui rapat dan mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat serta lembaga-lembaga di masyarakat untuk membahas mengenai perihal tentang penyampaian terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
3. Hambatan yang terjadi adalah dalam menyampaikan ulang kepada masyarakat yang tidak cukup sekali. Di sini para pegawai dituntut untuk menjelaskannya secara perlahan dan jelas agar tidak adanya kekeliruan dalam penerimaan informasi yang didapat.
4. Perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa sudah sangat tepat untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Perencanaan sudah tepat dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan prosedur.
5. Pengawasan yang dilakukan dalam proses pekerjaan terkait Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dilakukan oleh masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada di Desa tersebut.
6. Pelaporan atau pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa adalah menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang akan diberikan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bengawan.
7. Faktor pendukung dari masyarakat Desa Kendal sangat diperlukan, maka dari itu berjalan sudah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kendal sejak adanya pandemic COVID-19, berkat dukungan dari masyarakat Desa.
8. Keefektifan dalam penyampaian pesan adalah komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dan menghasilkan perubahan dalam sebuah organisasi, sehingga komunikan bisa menerima dengan jelas dan dapat disampaikan ulang dengan tepat sasaran sesuai apa yang disampaikan dari sumber yang pertama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Apandi, Paid. 2017. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur. E-Journal llmu Pemerintahan, 2017 5 (2): 711 - 720 ISSN 2477-2458 (Online), ISSN 2477-2631 Volume 5, Nomor 2, 2017: 711 – 720.

Atolia, Manoj. 2017. Investing in Public Infrastructure Roads or School. Journal (JEL Classification: E62:F34:H63:043:H54) Article January 2017 DOI: 10.5089/9781475595932.001, Florida State University.

Azwar, Saifuddin. 1998. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Badri, Muhammad. 2019. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2016. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019.

Belareq, Florentinus. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5(2): 701 - 710 ISSN 0000-0000 (online), ISSN 0000-0000.

Bungin, Burhan. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Cangara, Hafied. 2014. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Conrad, Charles. 1985. Strategic Organizational Communication: Cultures, Situations, and Adaptation. Holt, Rinehart and Winston. New York.

Dethier, Jacques dan Moore, Alexander. Infrastructure in developing countries: An overview of some economic issue. Journal ZEF-Discussion Papers on Development Policy No. 165.

Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif. Rajawali Pers. Jakarta.

Estache, et al., 2015. Financing Infrastructure in Developing Countries. Journal Oxford Review of Economic Policy, Volume 31, Numbers 3–4, 2015, pp. 279–304.

Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html. [Online, accessed 07 Juli 2022].

Forsdale, Louis. 1981. Perspectives on Communication. McGraw-Hill College. New York.

Goldhaber, Geral M. 1986. Organizational Communication. Brown Publisher. New York.

Hasmoro, Beny. 2014. Kepemimpinan Kepala Desa Kampung Baru Dalam Pembangunan Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 2, No 2 (2014).

Hasibuan, Malayu S.P, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Hendrik, Okta. 2013. Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (2): 459-469ISSN 0000-0000.

Karimah, Faizatul., Saleh, Choirul., Wanusmawatie, Ike. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.

Lamangida, Trisusanti., Firyal,. dan Akbar, Hasan., Hasna. 2017. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. Jurnal Ilmu Administrasi, ISSN :2301-573X E-ISSN: 2581-2084, Volume 6 Nomor 1 Juni 2017.

Liliweri, Alo. 2013. Dasar - Dasar Komunikasi Antar Budaya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi dan Komunikasi Organisasi. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Marsidi. 2017. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Jurnal Penelitian Politik dan Ilmu Sosial, September – Desember 2017 ISSN: 2252-5270 Volume 6 No. 4.

Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mukarom, Zaenal., Laksana, Muhibudin Wijaya. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. CV Pustaka Setia. Bandung.

Mulyana, Deddy. 2011.Ilmu Komunikasi. PT Rosdakarya. Bandung.

Mulyana, Deddy. 2016. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.

Nazir, Moh. Ph. D. 2009. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Palei, Tatyana. 2015. Assessing The Impact of Infrastructure on Economic Growth and Global Competitiveness. Jurnal Procedia Economics and Finance 23 (2015) 168 – 175, Prague, Czech Republic.

Pangkey, Deibby K. A. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 5 No1 (2016).

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/peraturanmenteridalamnegerirepublikindonesianomor84tahun2015tentangsusunanorgani. [Online, accessed 14 Juli 2022].

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2014. BN.2014/NO.2094. kemendagri.go.id: 34 hlm. [Online, accessed 07 Juli 2022].

Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. LN. 2005 No. 158, TLN No. 4587, LL SETNEG: 45 HLM. [Online, accessed 07 Juli 2022].

Punch, K.F. 1998. Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approach. SAGE Publications. British.

Ruliana, Poppy. 2014. Komunikasi Organisasi: Teori dan Studi Kasus. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf. [Online, accessed 07 Juli 2022].

Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). 2020. https://www.kemenkeu.go.id/media/15366/photostory\_pen\_demandside.pdf. [Online, accessed 07 Juli 2022].

Rodriguez, et al,. 2004. Towards Next Generation Coordination Infrastructures. Journal The Knowledge Engineering Review, Vol. 00:0, 1–24. C 2004, Cambridge University Press. DOI: 10.1017/S000000000000000 Printed in the United Kingdom.

Rosalina, Maya. 2013. Kinerja pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. E-Journal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (1): 106-120 ISSN 0000-0000.

Salim, Agus, 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Sarpin. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). E- Jurnal Administrasi Negara. Vol. 1 No 1, 2017.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta. Bandung.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM. [Online, accessed 07 Juli 2022].

Untung, Budi. 2014. CSR Dalam Dunia Bisnis. Andi. Yogyakarta.

Weick, Karl. 1979. The social Psychology of Organizing. McGraw-Hill.

Widjaja, HAW. 2010. Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Wulandari, Agustyarna. 2014. Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Sumber lain:

<https://www.pu.go.id/berita/dukung-pemulihan-ekonomi-nasional-program-pkt> kementerian-pupr-hingga-kuartal-ii-2021-sudah-serap-755816-tenaga-kerja. [Online, accessed 07 Juli 2022].